



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SIBOLGA
2025**

Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga Telp.(0631) 23914 Kode Pos 22513

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam pencapaian tujuannya dituntut untuk memiliki Program dan Kegiatan yang dapat mendukung dalam pencapaian Kinerja. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga tidak terlepas dari beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal.

Disadari sepenuhnya bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Untuk itu perlu suatu upaya dalam penyempurnaannya dimasa mendatang. Diharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya korektif maupun konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

SIBOLGA,

2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA,



Drs. SOFYAN MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650510 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. GAMBARAN UMUM OPD	3
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. PERENCANAAN	14
1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021-2026	14
2. Tujuan dan Sasaran.....	16
a. Tujuan	16
b. Sasaran	16
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
3.1.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024.....	29

3.1.2	MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023.....	31
3.1.3	MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA.....	34
3.1.5	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	36
3.1.6	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	39
B.	REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV	PENUTUP	44

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga merupakan sebuah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kota Sibolga. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan akan pencapaian kinerja yang dicapai secara transparan dan bertanggung jawab,

serta juga dapat mendorong Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Selain bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, maka diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada peningkatan sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan sumber daya memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga untuk mencari cara supaya potensi sumber daya yang masih minimum dapat diberdayakan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024 memiliki nilai rata-rata **79,83 %** hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja tujuan memiliki nilai **“Sangat Baik” (Kategori BB)**. Capaian Kinerja ini merupakan suatu gambaran bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga telah terlaksana dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kinerja Tahun 2024 kepada Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan,
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan Instansi Pemerintah,
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah, dan
4. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter)

yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 08 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga.
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026;

C. GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi para Pejabat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

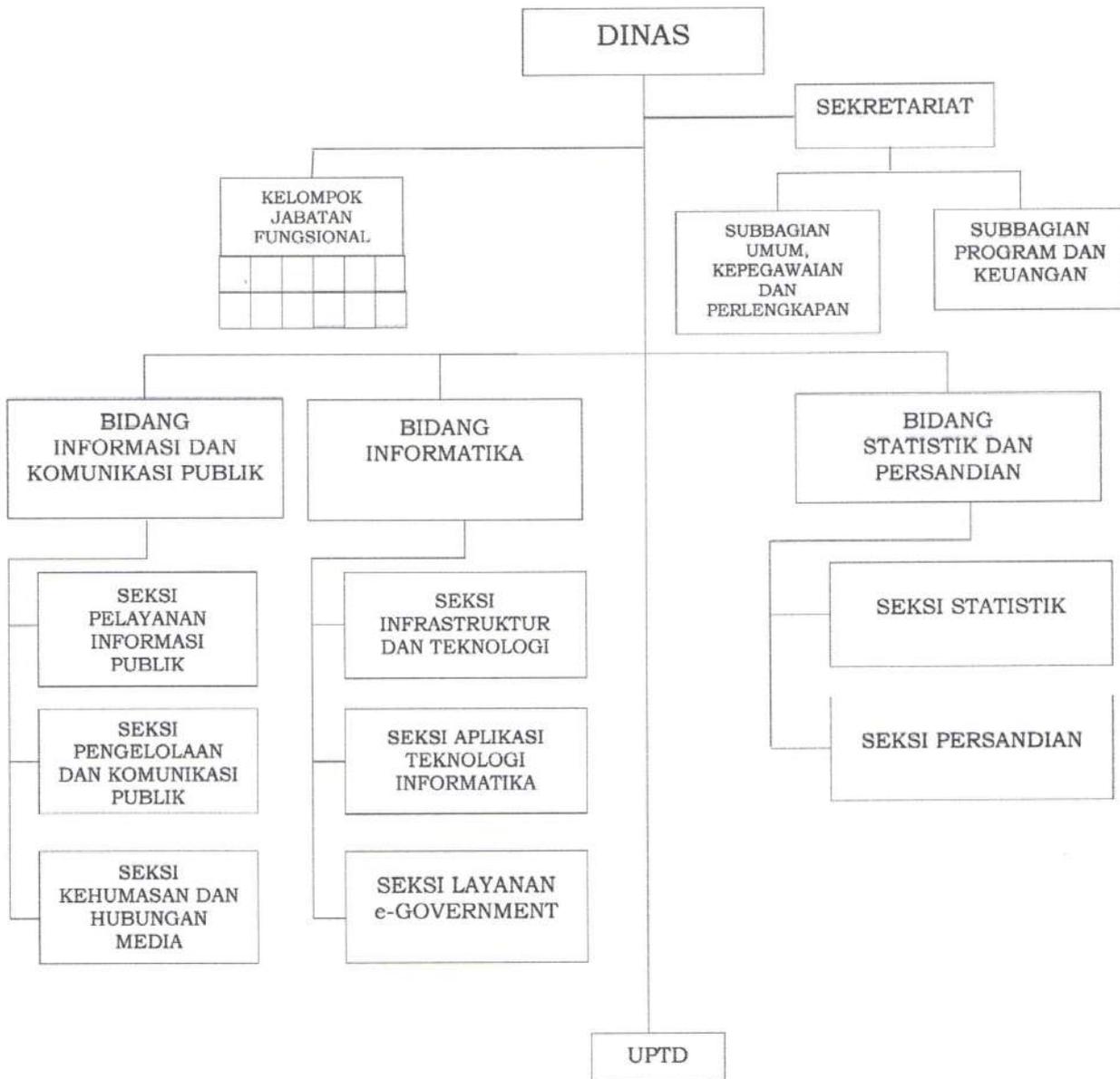
1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (Satu) Orang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang, 2 (Dua) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (Delapan) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Sekretaris membawahi :
 - a. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan
 - b. Kasubbag Program dan Keuangan;
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :
 - a. Kasi Pelayanan Informasi Publik
 - b. Kasi Pengelolaan Dan Komunikasi Publik
 - c. Kasi Kehumasan dan Hubungan Media
3. Kepala Bidang Informatika membawahi :
 - a. Kasi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Kasi Aplikasi Teknologi Informatika
 - c. Kasi Layanan e-Government
4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Kasi Statistik
 - b. Kasi Persandian

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATKA
KOTA SIBOLGA**



➤ **Sumber Daya Manusia**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga memiliki jumlah Pegawai sebagai berikut:

Sumber Daya Aparatur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	13	6	19
THL	14	18	32
<i>Jumlah.....</i>	27	24	51

Ket: Keadaan Tahun 2024

➤ **Susunan Pegawai berdasarkan :**

a. Kualifikasi Pendidikan :

Kualifikasi Pendidikan PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	S2	2	
2.	S1	15	
3.	DIPLOMA	1	
4.	SLTA	2	
TOTAL.....		20	

Ket: Keadaan Tahun 2024

b. Pangkat dan Golongan :

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari :

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	IV/a	2	
2.	IV/c	1	
3.	III/d	9	
4.	III/c	2	
5.	III/a	2	
6.	III/b	2	
7.	II/d	1	
8.	II/c	-	
9.	IX	1	
TOTAL.....		20	

Ket: Keadaan Tahun 2024

c. Jumlah Pejabat Struktural PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari

NO.	PEJABAT STRUKTURAL (ESELON)	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	III/d	8	
2.	III/c	2	
3.	III/b	2	
4.	IV/a	2	
5.	IV/c	1	
6.	Non Eselon	4	
TOTAL.....		19	

Ket: Keadaan 2024

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Kemajuan Pembangunan Daerah bukan saja dilihat dari sisi Pembangunan fisik yaitu adanya gedung-gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibangun. Namun, Pembangunan daerah juga tidak lepas dari seberapa besarnya peranan dan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika ditarik dari kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, maka hal yang menjadi sorotan adalah tentang bagaimana Peningkatan Administrasi perkantoran, Peningkatan Aplikasi Informatika, Peningkatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi, Peningkatan penyediaan data statistik sektoral.

Permasalahan tersebut di atas, merupakan suatu dasar dalam mengakomodir dalam Peningkatan Pelayanan Publik yang masih perlu dioptimalkan karena dapat menunjukkan suatu akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (*clean government*). Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi isu utama antara lain:

1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) Serta Pembangunan SPBE

Dengan berpedoman terhadap Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka dapat terwujud suatu tata kelola

pemerintahan ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya hal ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN. Bidang Informatika berperan penting dalam mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kota Sibolga. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan

negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Untuk dapat mewujudkannya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi. Dalam hali ini, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjadi Peranan utama dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip prinsip antara lain:

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidak sesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data

lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Dalam Hal ini, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi. Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah. Dalam hal ini, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Isu Strategis berdasarkan bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, tentunya banyaknya kendala-kendala yang masih menjadi penghambat dalam mewujudkan pelayanan yang Optimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai di setiap Bidang yang ada di Diskominfo. (Tenaga Ahli IT, Sandiman, Statistik)
2. Masih kurangnya/belum memadai jumlah sarana dan prasarana penunjang Komunikasi dan Informatika :
 - Gedung kantor yang memadai (masih menumpang di Setdakot Sibolga)
 - Peralatan Peliputan yang masih kurang (Kamera Video, dan perlengkapannya)
 - Pembangunan Backbone Fiber Optik
 - Tower CCTV (belum ada/masih menumpang)
 - Perangkat penyimpanan HDD Server 1 TB dan memori server (Belum ada)
 - Uninterruptible Power Supply (UPS) Server atau alat penyimpanan listrik cadangan pada server (belum ada)
 - Kamar Sandi (KASA) dan Alat Pendukung Kegiatan Pengamanan informasi Seperti Signal Jammer, Alat Kontra Penginderaan dan lain-lain
 - Repeater Radio.
3. Belum maksimalnya keseriusan OPD dalam menyampaikan informasi yang bersifat publik ke dalam website PPID.
4. Belum dilantiknya KIM di seluruh kelurahan berikut fasilitasi sistem dan peralatan dikarenakan belum didukung adanya anggaran.
5. Belum memiliki Software server security yang lisensi untuk fasilitas keamanan internet.
6. Masih seringnya ditemukan kendala secara teknis seperti terjadi Bug Web dan Fitur Tools Statistik yang masih belum memadai

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga T.A 2024 yaitu :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB. II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Tahun 2024.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga yang dirumuskan merupakan suatu jawaban atas permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga sebagai Visi Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut: "MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR".

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi tersebut di atas, maka disusunlah Misi yang merupakan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Sibolga maka disusunlah Misi Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City);

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru;
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama maupun di luar Kota Sibolga.

Dari kelima Misi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga turut mendukung pada misi 1 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel dengan adanya Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Sibolga tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tentunya mempunyai peran serta dalam mewujudkannya melalui peningkatan kualitas pelayanan yang optimal berdasarkan tugas dan fungsi yang ada. Namun, dalam melaksanakan pelayanannya, Diskominfo Kota Sibolga mempunyai hambatan dan pendorong dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi. Adapun hambatannya adalah masih belum optimal tersedianya perangkat jaringan berbasis internet terintegrasi pada seluruh OPD yang ada di Kota Sibolga yang dapat sebagai pendukung terselenggaranya E-Government dan Masih kurangnya Sumber daya manusia yang dapat pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan Faktor Pendorongnya adalah Diskominfo Kota Sibolga dibentuk menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Kemudian, adanya Peluang akan terjalinnya hubungan yang serasi

dan harmonis terhadap OPD lainnya yang terkait dalam hal koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas SDM kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang disusun oleh OPD merupakan penjabaran atau sebagai implementasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan merupakan arahan dalam pelaksanaan setiap urusan yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Tujuan yang dikehendaki dapat dirumuskan dengan melihat dan mempertimbangkan dengan baik antara lain jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, orang-orang yang akan menangani pekerjaan, beban atau volume pekerjaan dalam konteks pencapaian tujuan lima tahun ke depan.

Berdasarkan uraian di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga menetapkan Tujuan Tahun 2021-2026 adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”.

b. Sasaran

Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar dapat menjadi sebagai operasionalisasi dalam mencapai Tujuan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, efisien, dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Demi terwujudnya Tujuan Diskominfo Kota Sibolga maka perlu adanya Sasaran. Adapun Sasaran Diskominfo sebagai berikut :

1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun sasaran yang ditetapkan merupakan berdasarkan tujuan yang ada. Dengan demikian keterkaitan Misi Walikota Sibolga dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kota Sibolga dapat dilihat dalam pada Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kominfo Kota Sibolga berikut ini :

Keterkaitan Misi Walikota Sibolga dengan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kominfo Kota Sibolga

Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar, dan Makmur		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akuntabel		
NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya Administrasi Perkantoran. ➤ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar, dan Makmur		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akuntabel		
NO.	TUJUAN	SASARAN
		➤ Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

3. Indikator Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai LAKIP	A
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100
		Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	40
3.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Pengembangan dan Pemeberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	100
	Persentase Penyediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kesanggupan dari Pimpinan Instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ada pada lampiran laporan ini.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Eselon II
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	KEPALA DINAS	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	75	71,35	102,24
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33	29,8	90,30
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	44	41,75	94,88
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	50	30	60
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	100	100
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100
		Buku "kota dalam angka"	Tidak	Tidak	-
Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja					89,48

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Eselon III
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	SEKRETARIAT	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	BIDANG INFORMATIKA	Jumlah waktu pelayanan informatika	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah waktu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Eselon IV
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Waktu Layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
		Waktu Layanan Humas dan Keprotokolan Kantor			
		Waktu Pelayanan dan Evaluasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100
		Adanya RKBMD	1 dokumen	1 dokumen	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Adanya Dokumen RKA/RKPA, DPA/DPPA, RENSTRA dan RENJA	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		Adanya Dokumen LKPJ 2024, , LPT 2024 , LKjIP 2024 dan Evaluasi RKPd 2024	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	SEKSI KEHUMASAN DAN HUBUNGAN MEDIA	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	SEKSI PENGELOLAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	Jumlah Waktu penyediaan sumber daya pendukung	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah Waktu Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Kota Sibolga	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7.	SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT	Jumlah waktu Pelayanan Internet/Ethernet	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8.	SEKSI APLIKASI TEKNOLOGI INFORMATIKA	Waktu Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
9.	SEKSI STATISTIK	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
10.	SEKSI PERSANDIAN	Jumlah waktu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Penjelasan dari Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di tingkat Kecamatan di Kota Sibolga.

Dengan Rumus, Jumlah KIM : Jumlah kecamatan yang ada dalam kota x 100%.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase wilayah yang tercover oleh layanan telekomunikasi di Kota Sibolga. Dengan rumus, Luas Wilayah Yang Tercoverage : Luas Wilayah Keseluruhan.

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Sibolga. Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon : Jumlah penduduk x100

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase rumah tangga yang dapat mengakses internet dibandingkan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kota sibolga. Dengan rumus, Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet : Jumlah rumah tangga.

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kota Sibolga. Dengan rumus, Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi : Jumlah rumah tangga.

6. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi pada Kota Sibolga.

7. Buku "kabupaten dalam angka"

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan Buku "Kota dalam angka" di Kota Sibolga. Dalam hal ini, pihak yang menyediakan adalah Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. Jadi, Dinas Kominfo Kota Sibolga tidak lagi menyediakan hal tersebut.

8. Buku "PDRB"

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan Buku "PDRB" di Kota Sibolga. Dalam hal ini, pihak yang menyediakan adalah Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. Jadi, Dinas Kominfo Kota Sibolga tidak lagi menyediakan hal tersebut.

9. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Sibolga yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah. Dengan rumus, Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah : jumlah total perangkat daerah x 100%.

Tabel 3.1

**TARGET KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO KOTA SIBOLGA
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No.	Tujuan	Sasaran	IKU	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Misi ke Satu								
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Nilai Sakip OPD Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Proporsi rumah tangga dengan akses internet Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Persentase Perangkat daerah yang telah	100 A 82,01 100 70 30 40 0	100 A 82,12 100 71 31 42 30	100 A 82,33 100 72 32 43 40	100 A 82,60 100 73 33 44 50	100 A 83 100 74 34 45 60	100 A 84 100 75 35 46 70

❖ **ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90- 100	Sangat Memuaskan,
A	>80 -90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
BB	>70 -80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60 -70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50 -60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	> 30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	> 0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan sebahagian perubahan yang sangat mendasar

Evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran.

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI %	RATA-RATA PER SASARAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	100	100	100	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	89,48
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	73	74,64	102,24	
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	33	29,8	90,30	
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	44	41,75	94,88	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	50	30	60	
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	100	100	50
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100	
	Buku "kota dalam angka"	Tidak	Tidak	-	
	Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	-	

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Skala Pengukuran							Ket.
		AA	A	BB	B	CC	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	√	-	-	-	-	-	-	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	√	-	-	-	-	
3.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	√	-	

Pengukuran Kinerja diatas dapat diambil nilai rata-rata berdasarkan tujuan yaitu seperti tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Nilai Rata-Rata Sasaran	Nilai Rata-Rata Tujuan
1.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Good Goverance dengan transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan	100	79,83
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	89,48	
		Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	50	

Berdasarkan Nilai rata-rata Tujuan tersebut di atas yaitu sebesar **79,83%**, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatik Kota Sibolga Tahun 2024 mendapatkan kategori interpretasi **SANGAT BAIK**.

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Evaluasi dan Analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja 2023. Berikut ini merupakan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN DAN REALISASI					
			TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	Peningkatan kualitas Tatakelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Sakip OPD	A	A	100%	Proses	Proses	Proses	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	80,03	96%	82,60	81,20	96%	
4	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100%	100	100	100	
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	70	102,25	72,6	73	102,24	74,64	
6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	30	93,55	29	33	90,30	29,8	
7	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	40	96,07	40,35	44	94,88	41,75	
8	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	100	30	50	60	30	
9	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN DAN REALISASI					
			TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN
10	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Buku "kota dalam angka"	A	A	100%	A	dalam proses	dalam proses	
12	Buku "PDRB"	82	82,33	80,03	82,60	81,20	96%	

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Sehubungan dengan adanya pergantian Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2021-2026, maka segala perencanaan setiap perangkat daerah disesuaikan dengan Visi & Misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Demikian juga adanya pengukuran kinerja yang kemudian diatur kembali dari awal sesuai dengan periodisasi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Sehingga untuk capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan karena pada tahun ini merupakan masih tahun awal dalam pengukuran kinerja sesuai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

No.	Tujuan	Sasaran	IKU	Satuan	Target Akhir	Capaian	Realisasi %
					2026	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	%	100	100	100
			2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon		%	75	71,35	95,13
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet		%	35	28,31	80,88
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		%	46	40,06	87,08
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	70	0	-	

	3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100
		Buku "kota dalam angka"	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	-
		Buku "PDRB"	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	-

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Alternative Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Sibolga dengan indikator kinerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kota Sibolga.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
2.	Meningkatkan Tatakelola Pemerintah dengan Pengembangan Aplikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	74,64		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	74,64	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,8		Persentase Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,8	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	41,75		Persentase Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	41,75	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandai dalam	100		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandai dalam	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja

												masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
												Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
												Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan *output*.

Adapun nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran dapat dilihat dari belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut

Belanja	Jumlah Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	2,813,381,136	2,312,501,006,-	500,880,130
Belanja barang dan jasa	100,548,900	65,215,900	35,333,000
Total	2,913,930,036	2,377,716,906	536,213,130

Selanjutnya selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (*Outcome*) dengan keluaran (*Output*), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (*Outcome*).

Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam melaksanakan kegiatan pada saat ini nilai efektifitas yang didapat sebesar **78,56 %** sehubungan dengan adanya anggaran Gaji ASN yang mana otoritas untuk menginput kegiatan ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*** tersebut pada aplikasi SIPD RI adalah BPKPAD Kota Sibolga, yang mana Anggaran di Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, melebihi jumlah ASN yang ada sehingga terdapat nya sisa anggaran pada ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*** sebesar **Rp. 500.880.130** dengan jumlah ASN 18 orang, yang seluruh ASN telah mendapatkan Gaji dan Tunjangannya. Maka seharusnya nilai persentase efektifitas Seluruh kegiatan yang didapat adalah sebesar **82,19% (Sangat Tinggi)**.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Dinas Kounikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.526.055.234	5.471.920.126	72,71
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.813.381.136	2.312.501.006	82,19
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.015.900	436.552.945	86,44
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.219.900	925.251.350	93,62
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.726.900	117.268.725	94,78
2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	49.980.000	35.420.000	70,86
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	49.980.000	35.420.000	70,86
3.	Meningkatkan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pengembangan Aplikasi Menuju Smart City	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.045.731.398	1.644.926.100	54,00
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	659.731.498	105.154.400	15,93
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.385.999.900	1.539.771.700	64,53

4.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	-	-	-
5.	Meningkatkan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-
TOTAL			10.621.766.632	7.152.266.226	67,34

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [(Realisasi\ Biaya : Target\ Biaya) \times 100\%]$.

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 5.471.920.126,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 7.526.055.234,.

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah :

- Persentase Efisiensi Biaya = $100\% - [(5.471.920.126 : 7.526.055.234) \times 100\%]$
 - Persentase Efisiensi Biaya = **72,71 %**
- Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi keuangannya sebesar Rp 1.468.284.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 60.909.162,00 yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk SPPD Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp9.820.000,00;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Desember 2024 sebesar Rp35.500.800,00, Pembayaran listrik kantor bulan Desember 2024 sebesar Rp6.289.862,00;
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebagai berikut:
 1. Belanja alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor – Benda pos Sebesar Rp1.692.000,00
 - d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebagai berikut :
 1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan kantor- Perabot Kantor sebesar Rp7.606.500,00;

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik :

1. Pengelolaan Media Komunikas Publik sebagai berikut:
 - a. Biaya Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp9.000.000,00;
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp5.345.000,00

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika :

1. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah seabgai berikut:
 - a. Belanja Kawat/ Faksimile/Internet/ Tv Berlangganan sebesar Rp.845.000.000;
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Aset Tak Berwujud – Pengoadaan Software Aplikasi Teknologi Sm@Rt247 Sebesar Rp.475.000

BAB IV P E N U T U P

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga telah berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perhatian dan pembenahan pada tahun – tahun mendatang. Suatu Keberhasilan dapat terwujud berkat adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah merupakan salah satu media akuntabilitas, yang menyajikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan atau program yang dilaksanakan yang digunakan sebagai umpan balik dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disajikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga. Masalah-masalah maupun hambatan–hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sasaran, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan perlu adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun. Hal ini sangat kami harapkan demi perbaikan dalam penyusunan secara sistematis yaitu perencanaan dan capaian kinerja yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

SIBOLGA,

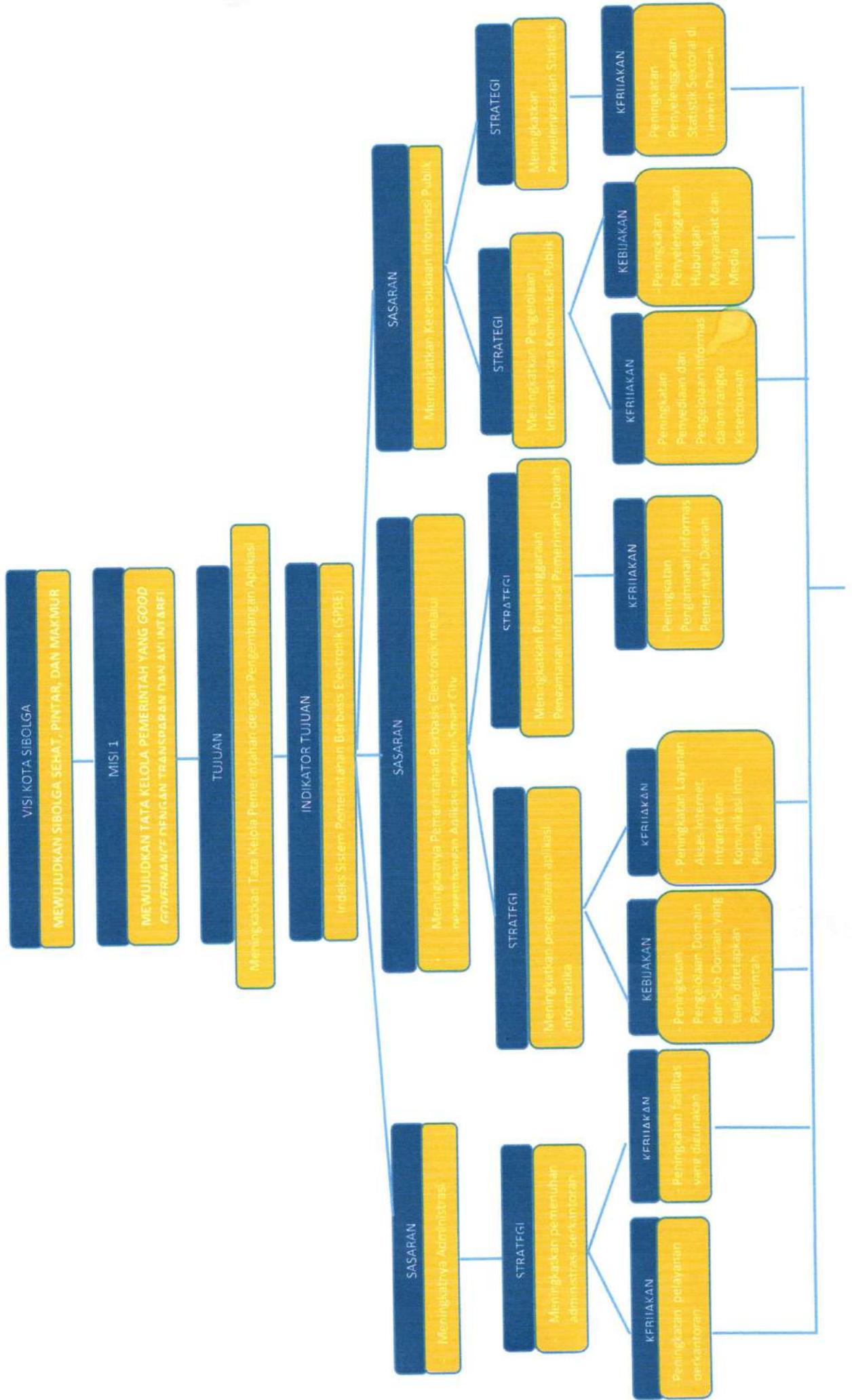
2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA,



Drs. SOFYAN MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650510 199303 1 004

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-2026



PROGRAM PRIORITAS OPD

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Peningkatan Informasi

SASARAN PROGRAM URUSAN

1. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR PROGRAM URUSAN

4. Persentase informasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan
5. Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi
6. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian
7. Persentase tetap statistik sektoral yang dipublikasikan

KEGIATAN

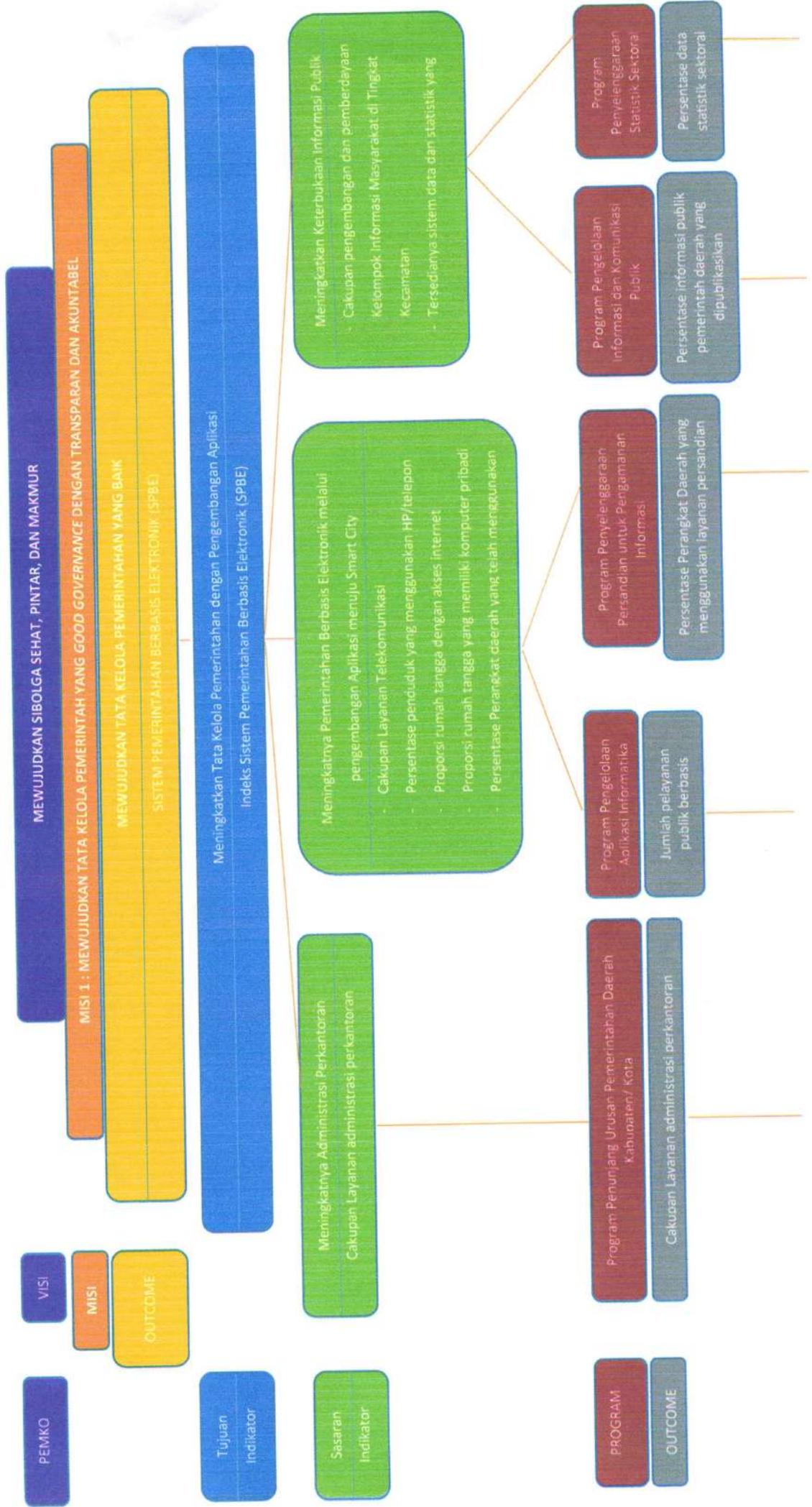
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Peningkatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
6. Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

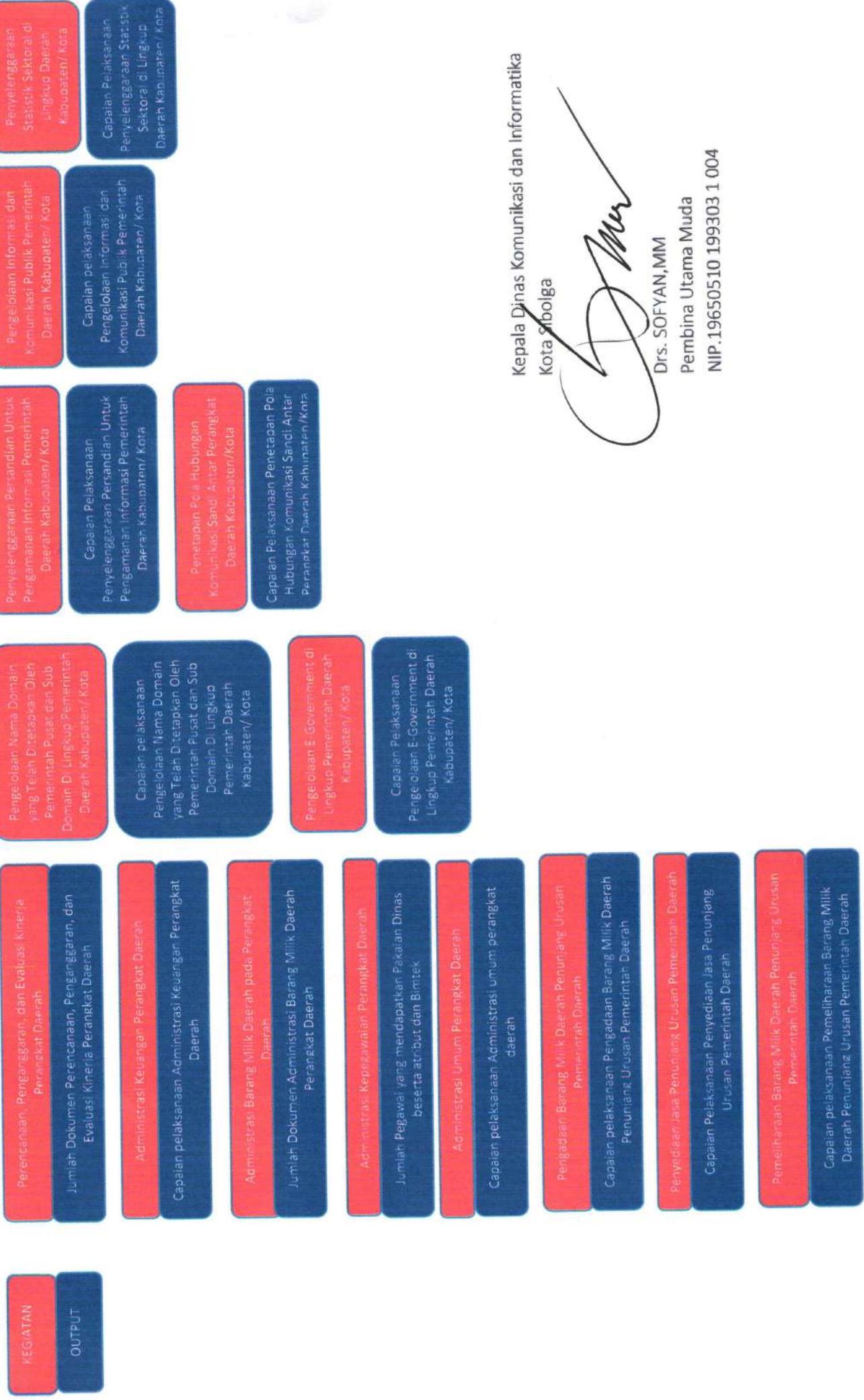
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sibolga



Drs. SOFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650510 199303 1 004

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-2026





Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sibolga

Drs. SOFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650510 199303 1 004